

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat (publik). Organisasi disektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga di alami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai salah satu bentuk organisasi publik. pemerintah bertanggung jawab untuk untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemaku kepentingan.

Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai, dan kualitas. Menurut Payamta dalam Isnan Zakaria Lubis,

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi secara benar dan jujur. Para pengguna laporan keuangan yakni dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan daengan baik, disetujui dan di audit secara trasparan, dapat di pertanggungjawabkan dan berkualitas.¹

Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif. kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar

¹Isnan Zakaria Lubis, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pengembangan Mutu Karyawan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Yang Terdapat di Kota Medan**, Skripsi Priodi Akuntansi Universitas Sumatera Utara 2016, Hal.1

akuntansi pemerintahan bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan masa depan : andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan materi, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat di verifikasi : dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dan dapat dipahami oleh penggunanya. Baik buruknya kualitas laporan keuangan pemerintahan ini dapat dilihat berdasarkan pemeriksaan serta penilaian lembaga independen. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) setiap tahunnya ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan yaitu :

Pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu. BPK kemudian memberikan penilaian berupa opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). (h Melalui opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah maka dapat dilihat sebaik apa kualitas laporan keuangan yang disajikan.²

Berdasarkan data pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam opini atas LKPP Tahun 2017. Selain memberikan opini, BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil review atas pelaksanaan

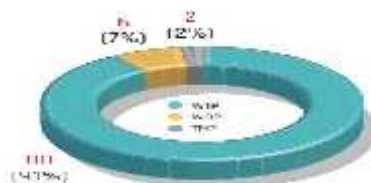
²<http://www.bpk.go.id>

transparansi fiskal. LHP tersebut mengungkapkan 13 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak mempengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2017. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Di samping opini dan permasalahan di atas, BPK juga mengungkapkan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal secara memadai. Tiga pilar transparansi fiskal yang diukur adalah pelaporan fiskal, perkiraan fiskal dan penganggaran, serta analisis dan manajemen risiko fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50%, *level Good* sebanyak 13 kriteria atau 36%, *level Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8% dan *NotMet* sebanyak 2 kriteria atau 6%. Review dilakukan berdasarkan *The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC)* Tahun 2014.

BPK memeriksa 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2017 (LK BPK Tahun 2017 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik). Hasil pemeriksaan menunjukkan 79 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1. Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017



sumber: <http://medan.tribunnews.com>

Berdasarkan Grafik 1, opini WTP sebesar 91% (termasuk LK BPK) masih di bawah target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sebesar 95% Tahun 2019. Indeks opini atas capaian tersebut adalah sebesar 3,86 atau 0,02 poin di bawah target bidang Reformasi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,88.

Menurut berita yang dilansir dilaman *website* Tribun-Medan berkaitan dengan Kota Medan masih belum mencapai target karena BPK mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.030 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 Triliun, serta 204 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 Triliun.³

Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa kemungkinan terjadinya penurunan opini laporan keuangan pada pemerintah Kota Medan dapat disebabkan karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta belum dimanfaatkannya teknologi informasi, dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

³<http://medan.tribunnews.com>

Kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dimana kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu dalam melaksanakan pekerjaannya atau wewenangnya untuk mencapai tujuan dari suatu entitas tersebut secara efektif dan efisien dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Karena Pegawai yang memahami pengelolaan keuangan yang baik dan benar akan dapat melaksanakan tanggung jawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan. Semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka akan semakin *menentukan* kualitas laporan keuangan demikian sebaliknya.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Karmila Tanjung dan Darlis yang menemukan bukti bahwa.

Terbatasnya pegawai pemerintahan yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi mengakibatkan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.⁴

Menurut Yosefrinaldi, **kapasitas sumber daya manusia salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai.⁵**

Dalam pengelolaan keuangan daerah , Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan

⁴Karmila Tanjung dan Darlis, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan**, Skripsi Prodi Akuntansi Universitas Riau 2014, hal 28

⁵Yosefrinaldi, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**, Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Sumatera Barat, 2013 hal 25

akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, atau mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas memadai akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami logika akuntansi disebabkan karena sumber daya manusia tidak dibekali dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman di bidang keuangan, hal tersebut berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Selain kapasitas sumber daya manusia, faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi, Teknologi informasi dapat menjadi sarana pemrosesan, penyimpanan maupun penyebaran informasi bagi suatu instansi guna menciptakan efektifitas dan efisien. dan teknologi informasi dianggap sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya lebih mudah, karena dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada maka dalam penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah dan cepat. dimana menurut penjelasan peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelolah keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk

membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu secara menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dalam keuangan, pemanfaatan teknologi ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan cara pengaplikasian *software* dan *hardware* sebagai sarana pemrosesan yang dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dengan pemanfaatan teknologi berupa *hardware* dan *software*, satu instansi akan mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan. Sekalipun dalam hal ini kesalahan itu ada, akan lebih cepat dan mudah diperbaiki dengan mengikuti prosedur *software* yang digunakan.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian dari Yosefrinaldi , menemukan bukti bahwa, pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi akan meningkatkan ketepatanwaktuan Laporan Keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan pemerintah kepada pelayanan publik. Dan pemanfaatan teknologi informasi ini juga sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Indriasari dan Nahartyo, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan

menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepadapelayanan publik, selain itu dengan menggunakan teknologi informasi salah satunya komputer dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan akan lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada sistem manual.

Pengelolaan keuangan pemerintah harus dilakukan oleh setiap anggota dari organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan integritas yang tinggi. Selain itu diperlukan juga kontrol yang baik. Kontrol yang dilakukan untuk mencegah atau meminilasikan terjadinya kesalahan. Oleh sebab itu untuk mewujudkan pencegahan pemerintah membuat sistem pengawasan dan pengontrolan pada kinerja pemerintah. Kegiatan tersebut diberi nama Sistem Pengendalian Internal Pemeritah (SPIP) yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Selain kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, SPIP merupakan faktor yang ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Menjelaskan bahwa SPIP “ memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif, efisien, keterandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 diatas menjelaskan bahwa SPIP terdapat unsur ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dijelaskan bagaimana SPIP dapat mempengaruhi kualias laporan keuangan. Maka akan menjamin kegiatan personil yang ada dalam pemerintahan telah taat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan sistem pengendalian intern (SPIP) yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi. Sistem pengendalian intern ini merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai. Yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan pengendalian internal keuangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hal ini di perkuat oleh penelitian Chambers dan Payne (2009), menemukan bahwa adanya undang-undang yang membahas tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan dapat meningkatkan kualitas pelaporan. Pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan efektifitas kegiatan operasi, serta merupakan pondasi *good governance* dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk melihat apakah kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terutama di bidang akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Medan. Sehingga penelitian ini diberi judul :**“PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SISTEM PENGENDALIAN INTREN PEMERINTAH**

(SPIP), DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN”

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui apakah sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Dibidang Akuntansi Pemerintahan berpengaruh atau tidak terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan, dimana penelitian ini dilakukan pada SKPD Kota Medan dengan menyebarkan kuisisioner.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan ?
3. Apakah sistem pengendalian intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan?

4. Apakah sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dibidang Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan dan batasan masalah diatas, dalam penelitian ini menjadi tujuan penelitian adalah untuk melihat dan mengetahui apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dibidang Akuntansi Pemerintah berpengaruh atau tidak terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas maka penelitian mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laoporan keuangan Pemerintah Kota Medan.
2. Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Sebagai referensi bagi Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dan penulis lain yang akan mengadakan penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang lengkap dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Pirmatua Sirait:

Laporan keuangan (*Financial Statement*) merupakan “hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan”.⁶

Menurut Kasmin mengemukakan :

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari transaksi yang terjadi pada perusahaan, transaksi-transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan dan diringkas dengan cara yang setepat-tepatnya dengan satuan uang yang kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.⁷

⁶Pirmatua, *Pelaporan dan Pelaporan Keuangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 19-20

⁷Kasmin, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima : Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hal 7.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode” (PP No.8 Tahun 2006).Sedangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki pengertian sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah taraf atau derajat suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama suatu periode.Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya digunakan.

2.1.2 Fungsi dan tujuan laporan keuangan

Pada umumnya, fungsi dari laporan keuangan ini adalah sebagai alat untuk membantu pemerintahan dalam menilai keadaan keuangan pemerintah.Dan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Informasi

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintah**

dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1. Sebagai Media Review

Financial statement bisa menyajikan informasi atau data yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi ulasan tentang keadaan perusahaan secara menyeluruh, terutama keadaan keuangan (aset, utang, biaya operasional, dan yang lainnya).

2. Sebagai Pedoman Membuat Keputusan

Salah satu fungsi paling penting dalam pembuatan laporan tentang keadaan keuangan perusahaan yaitu sebagai media pertimbangan dalam pengambilan keputusan penting untuk perusahaan.

3. Membantu Menciptakan Strategi Baru

Financial statement juga bisa digunakan dalam membuat strategi baru oleh perusahaan dalam usaha menaikkan performa usahanya.

4. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan

Perusahaan yang membuat *financial statement* akan menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah menerapkan sebuah sistem perekapan data yang terpercaya, akurat, serta tidak sembarangan dalam pengambilan keputusan. Para pemegang saham tentu akan lebih percaya untuk menginvestasikan uang

mereka terhadap perusahaan yang dipercaya dan mempunyai kredibilitas yang baik.

Menurut Erlina, Omar Bakti, dan Rasdianto, :

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi seluruh kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkualitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman”.⁹

2.2 Kualitas Laporan Keuangan.

2.2.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya merupakan laporan yang terstruktur dan menunjukkan informasi yang jelas.

Elvin Andrianto:

⁹Erlina, Omar Bakti dan Radianto, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Salembah Empat, Jakarta 2017, Cetakan Ketiga, hal 19-20

“mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan taraf atau derajat suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah taraf atau derajat suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama suatu periode. Laporan keuangan yang memiliki Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Bab I Pasal I Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya akan mampu memberikan informasi yang lengkap untuk digunakan menjadi alat perencanaan dan pengambilan keputusan.

2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dipublikasikan umumnya terdiri dari 5, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan.

a. *Balance Sheet* (neraca)

¹⁰Elvin Andrianto, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Skripsi Priodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta 2017, hal 15.

Balance Sheet (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

b. *Income Statement* (Laporan laba rugi)

Income Statement (Laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.

c. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

e. Laporan catatan atas laporan keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi

tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Pada penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tentunya harus memiliki seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD), laporan tersebut akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah/pusat dimana laporan ini akan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporannya.

2. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)**

laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan satu entitas dimana neraca ini berisi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. **Laporan Operasional (LO)**

laporan operasional menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. **Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan

saldo awal, penerimaan, peneluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama satu periode tertentu.

6. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. **Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rinci dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas¹¹

2.2.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas LKPD yaitu menurut PP No. 71 Tahun 2010, diantaranya:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. **Pemanfaatan umpan balik (*feedback value*)** Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

b. **Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini:**

c. **Tepat waktu**

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. **Lengkap**

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup

semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memnuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.¹²

Selain indikator yang dijelaskan diatas Soemarso mengatakan dapat di sebutkan dimensi beserta indikator yang terkait dengan kualitas Pelaporan keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Proses Pelaporan

- a. Pencatatan Pencatatan transaksi berarti mengumpulkan data secara kronologis.

¹²PP No. 71 Tahun 2010, **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual 10-11

- b. Penggolongan Penggolongan transaksi untuk penyajian dapat diringkas.
- c. Pengiktisaran menyajikan informasi yang telah digolongkan ke dalam bentuk laporan-laporan yang diinginkan.

2. Kualitas/ karakteristik kualitatif

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, adalah :

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal(*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau

jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara *relative*.

Berdasarkan uraian indikator yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini menggunakan indikator yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan.

2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada sektor swasta manajemen adalah mekanisme pengawasan perusahaan. Faktor potensial yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan adalah kualitas dari mekanisme tata kelola eksternal perusahaan (seperti : kualitas audit), dan mekanisme tata kelola internal perusahaan (seperti : kualitas dewan direksi). Selain itu keputusan manajemen dan regulasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, mekanisme tata kelola internal dan eksternal perusahaan juga akan mempengaruhi pelaporan keuangan penilaian kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah adalah salah satunya berdasarkan

kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah yang ada. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.3.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dimana karakteristik, sikap dan perilaku dari orang-orang yang menghasilkan output kerja unggul yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Yosefrinaldi :

“Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.”¹³

Menurut Malaya dalam Samuel Hutapea yang berjudul Kualitas laporan keuangan ditinjau dari SDM dan Pengendalian Intern pada pemerintah

¹³Elvin Andrianto, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Skripsi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hal 20

Kabupaten Toba Samosir **“pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan”**.¹⁴

Menurut Dhedy Triwardana :

Sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.¹⁵

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang diterapkan dipemerintah.

Menurut Darwanis dan Mahyani, dalam Isnan Zakaria Lubis mengemukakan:

“Kapasitas sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi”.¹⁶

Dikatakan unsur terpenting karena, manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai

¹⁴Samuel Hutapea, **Kualitas Laporan Keuangan Ditinjau dari SDM dan Pengendalian Intern**, Medan, 2012. Hal.17

¹⁵Dhedy Triwardana, **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar**, JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 2017

¹⁶Isnan Zakaria Lubis, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Peningkatan Mutu Karyawan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah sakit Umum Yang Terdapat Di Kota Medan**, Skripsi Prodi Akuntansi Universitas Sumatera Utara 2016, Hal 14.

tujuan organisasi, serta manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi tersebut.

Menurut Zuliarti :

Pengertian kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.¹⁷

Ada pun tujuan kapasitas sumber daya manusia yaitu.

- a) Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk.
- b) Meningkatkan produktifitas karyawan.
- c) Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja
- d) Mengurangi *turn over* dan absensi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan harapan dapat meminimalisasikan terjadinya kesalahan dalam pencatatan Laporan Keuangan.

2.3.2 Indikator Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan sukar beradaptasi dengan perubahan tingkat teknologi yang menyertai pembangunan. Hal ini dikarenakan perlu peningkatan sumber daya manusia agar menjadi sumber daya

¹⁷Ibid Hal 14-15.

manusia berkualitas. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia karena penduduk mempunyai tiga dimensi dan proses pembangunan sebagai penguasa dan pengambil keputusan dalam pembangunan, sebagai pelaksana pembangunan dan sebagai penerima penikmat hasil-hasil pembangunan.

Menurut Menurut Griffin dalam Elvin Andrianto Indikator yang dapat mengukur kapasitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi: pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan nonformal.

2) Pelatihan

Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

3) Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan dasar yang relatif tepat dan perilaku yang diakibatkan pengalaman dan praktek. Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.¹⁸

Menurut Alimbudiono, Sandra dan Fidelis dalam Elvil Andriantountuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari.

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan

¹⁸ Elvil Andrianto **Op.Cit**, hal 21

tugas. Tanggung jawab yang baik adalah dapat memahami dan melaksanakan tugas sesuai deskripsi jabatan.

2. Kompetensi sumber daya

kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, indikator Kapasitas Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari hasil modifikasi peneliti, diantaranya: latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan tanggung jawab.

2.3.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat di akses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh daerah. Teknologi merupakan mesin untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpan data diluar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*). Teknologi yang maju (komputerisasi) dirasa dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena teknologi diyakini mempermudah dan mempermudah.

¹⁹ Elvil Andrianto **Op.Cit**, hal 34

Menurut Djoko Purwanto mengemukakan:

Teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa (*engineering*), dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana apikasinya, computer dan intersksinya manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi social,ekonomi, dan budaya.²⁰

Sedangkan pendapat RicardusEko Indrajit mengemukakan:

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data /informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.²¹

Pengembangan sistem informasi yang sesuai memerlukan perpaduan dari berbagai pengetahuan tentang sistem komputer, sistem informasi dan pengetahuan tentang bagaimana merancang dan menerapkan sebuah sistem informasi serta bagaimana memperoleh sistem komputer yang diperlukan.teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Memanfaatkan kemajuan teknologi tidak hanya dalam teknologi komputer. Jaringan internet juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum,salah satunya digunakan dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk

²⁰Djoko Purwanto, **Komunikasi Bisnis**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 319

²¹Ricardus Eko Indrajit, **Sistem dan Teknologi Informasi**, Edisi Kedua Yogyakarta 2016, hal.61

mempermudah menyusun laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya :

1. pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pengolahan data, pengolahan informasi, serta proses kerja secara elektronik dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan adanya kemudahan dan kemurahan untuk mengakses informasi keuangan. Selain itu, pengolahan data dengan bantuan komputer jelas akan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan.

Menurut pendapat Murhada dan Yo Ceng Giap

“Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputerisasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video”.²²

Hanonimengemukakan:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja, Teknologi yang dimanfaatkan dalam hal ini merupakan berbagai perangkat keras (*Hardware*) maupun perangkat lunak (*Software*) maupun jaringan internet”²³

²²Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*, Edisi Pertama: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011, hal. 2

²³Hanoni, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan Teknologi informasi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan laporan keuangan yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam pembuatan laporan keuangan. Teknologi juga dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi dengan baik.

2.3.4 Fungsi dan Tujuan Pemanfaatan Teknologi

Teknologi berfungsi untuk menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, atau transmisi. Teknologi mengkompilasikan catatan rinci aktivitas input dan dikelola menjadi output. Mengelola atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengelolaan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis, perhitungan, sintesis (penggabungan) segala bentuk data informasi. Selain itu teknologi juga berfungsi untuk menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, Sedangkan tujuan pemanfaatan

teknologi adalah untuk memecahkan satu masalah, membuka kreatifitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Menurut Murhada dan Yo Ceng Giap mengemukakan fungsi teknologi informasi adalah.

1. *Capture*
Proses penyusunan record aktivitas yang terperinci.
2. *Processing*
Proses mengubah, menganalisis, menghitung dan mengumpulkan semua bentuk data atau informasi.
3. *Generation*
Proses yang mengorganisir informasi kedalam bentuk yang bermanfaat.
4. *Transmission*
Proses komputer mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi²⁴.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut juga mencakup adanya :

- a. pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan
- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Teknologi juga dapat berfungsi untuk menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, atau transmisi. Teknologi mengkompilasikan catatan rinci aktivitas input dan dikelola menjadi output. Mengelola atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengelolaan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis, perhitungan, sintesis (penggabungan) segala bentuk

²⁴Ibid, hal. 2

data informasi. Selain itu teknologi juga berfungsi untuk menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, ataupun grafik. Sedangkan tujuan pemanfaatan teknologi adalah untuk memecahkan satu masalah, membuka kreatifitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

2.3.5 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Murhadapemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen berikut:

1. Perangkat keras komputer (*hardware*)

Perangkat keras merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contoh perangkat keras misalnya, monitor, keyboard, mouse, printer, harddisk, memori, dan lain-lain.

2. Perangkat lunak komputer (*software*)

Perangkat lunak merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi tiga : perangkat lunak sistem, perangkat lunak bahasa program, dan perangkat lunak aplikasi.

3. *Brainware*

Brainware merupakan pengguna, pemelihara, pembuat sistem teknologi. Tanpa komponen ini perangkat keras dan perangkat lunak tidak akan berarti apa-apa.²⁵

Menurut Suyanto dalam Elvin Andrianto pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen berikut:

1. Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)

Perangkat keras bagi sesuatu sistem informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.

2. Perangkat Lunak Komputer (*Software*)

Seperti *sistem* perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti sistem pengoperasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contohnya:

²⁵Ibid, hal 3.

e-commerce, DSS (*Decision Support System*), e-banking, SAP, dan sebagainya.

3. Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk mempermudah dan menjaga kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.²⁶

Menurut Winidyaningrum dalam Elvin Andrianto pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya:

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat²⁷

Sedangkan menurut Sukirman dalam Elvin Andrianto, indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki perangkat komputer
- b. Memiliki dan memanfaatkan jaringan internet
- c. Mengadakan proses akuntansi yang terkomputerisasi
- d. Menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Adanya laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi.
- f. Adanya pemeliharaan peralatan.
- g. Adanya perbaikan peralatan yang rusak/usang.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil modifikasi peneliti, diantaranya:

- 1 Penggunaan komputer (*Hardware dan Software*),

²⁶Elvin Andrianto, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Skripsi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hal 24

²⁷*Ibid*, hal 40

²⁸*Ibid*, hal 41

2 penggunaan jaringan

2.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Iintern Pemerintah

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, ialah

“Suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.²⁹

Diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terdiri dari :

- a. lingkungan pengendalian
- b. penilaian risiko
- c. kegiatan pengendalian
- d. informasi dan komunikasi
- e. pemantauan pengendalian intern.

²⁹Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 **Tentang Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Pemandagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan”.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalanpelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan oerorganisasi pemerintah dapat terncapai dan kerugian atau kemungkinan ancaman keamanan dalam organisasi dapat dikurangi.

2.4.2 Tujuan serta manfaat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Esensi dari organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada setiap manajemen. Jilka manajemen puncak merasa bahwa pengendalian intern itu penting maka anggota dalam rangka organisasi akan merasakan hal itu dan bereaksi dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dilain pihak, jika pengendalian intern tidak dijadikan kepentingan manajemen puncak dan hanya dijadikan *lip service* (omongan belaka) maka dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian intern tidak dapat dicapai dengan efektif.

³⁰Pemandagri No. 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus didukung oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penerapan SPIP merupakan bentuk pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan dimana SPIP merupakan pondasi organisasi sehingga suatu organisasi akan kokoh, mantap dan dapat bekerja sesuai dengan jalurnya. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu :

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberikan jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Untuk mencapai tujuan dari SPIP dimaksud maka OPD harus menerapkan unsur dari SPIP dalam setiap aktivitas operasional OPD yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Akibat dari tujuan SPIP tersebut maka akan memberikan manfaat agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya melalui pelaporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Sedangkan manfaat sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa operasi/kegiatan instansi menjadi efektif, efisien dan ekonomis.
2. Mendeteksi terjadinya kesalahan (*mismanagent*) dan *fraud* dalam pelaksanaan aktivitas organisasi.
3. Membantu pengamanan asset terkait terjadinya *fraud*, pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan.
4. Memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan
5. Memberi keyakinan akan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Membantu manajemen merespon perubahan.

2.4.3 Karakteristik Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Intern Pemerintah.

Karakteristik penyelenggaraan kegiatan pengendalian intern tertuang dalam PP No.60 Tahun 2008. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas. Dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian digunakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko.

3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
6. Kegiatan pengendalian di evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti diharapkan.

Kegiatan pengendalian internal dijalankan oleh seluruh pegawai dan pejabat dalam pemerintahan untuk menjamin berjalanya pemerintahan yang bebas dari kecurangan. Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik maka dilakukan kegiatan pengendalian yang terdiri atas :

1. *Review* atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas asset
5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
6. Pemisah fungsi
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatanya
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Dengan dilakukannya kegiatan pengendalian intern dalam pemerintah dapat mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam mengukur dan mendeteksi penyelewengan. Pengendalian intern pemerintah menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga padamasing-masing individu. Peraturan yang ada bukan akhir namun merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh karena itu, implementasi SPIP sangat bergantung pada komittmen, teladan pinpinan dan niat baik dari seluruh elemen pejabat dan pegawai instansi pemerintah.

2.4.4 Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kerangka pengendalian intern yang telah diterima disebagian besar lingkup Amerika Serikat adalah kerangka pengendalian intern COSO yang memiliki lima komponen kerangka pengendalian intern yaitu lingkup pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, dan komunikasi (Elder dalam Nurul). Kerangka pengendalian interna COSO tergantung dalam PP No.60 2008 yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
 2. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 3. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
 4. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 5. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 6. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Selain indikator yang dijelaskan diatas, menurut Badan Karantina Pertanian (BKP) kementerian pertanian.dalam menilai sistem pengendalian internal pemerintah menggunakan satu indikator yaitu tingkat maturitas SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan /kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan.Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat karakteristik dan level SPIP yaitu sebagai berikut :

1. Belum Ada

Jika sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.

2. Printisan

Ada praktek pengendalian intern dan sudah ada kesadaran pentingnya pengendalian intrn, namun pendekatan resiko dan pengendalian dilakukan masih tidak terorganisir dengan baik dan pelaksanaannya masih tergantung pada individu.

3. Terdefenisi

Instansi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

4. Terkelola dan terstruktur

Instansi telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.

5. Optimum

Instansi telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Berdasarkan uraian indikator yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini menggunakan indikator pengendalian intern COSO yang tertuang dalam PP No 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Penelitian Terdahulu

1. Rizal Pramudiarta (2015)

Penelitian yang dilakukan Rizal Pramudiarta (2015) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner harus disusun dengan baik dan mudah dipahami agar responden mampu dan mau menjawab sehingga mendapatkan *response rate* setinggi mungkin. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.

2. Dhedy Triwardana (2017)

Penelitian yang dilakukan Dhedy Triwardana (2017) dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Kampardengan menyebarkan kuesioner. Pensampelan atas responden dilakukan secara *purposive*. tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang *realibel* aka nmenghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Dan hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Evin Andrianto(2017)

Penelitian yang dilakukan Evin Andrianto(2017) Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)” Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat daftar pernyataan/pernyataan dalam sebuah kuesioner yang akan diisi oleh responden. Butir pernyataan/pernyataan dan pilihan jawaban dalam kuesioner disesuaikan dengan variabel-variabel yang akan diukur. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa

kuesioner. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti adalah skala likert. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

4. Emilda Ihsanti (2014)

Penelitian yang dilakukan Emilda Ihsanti (2014) dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan Jenis data data primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur dimana setiap responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Hasil yang diperoleh penelitian ini ialah menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. As Syifa Nurriah (2014)

Penelitian yang dilakukan As Syifa Nurriah (2014) dengan judul pengaruh Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD

Kota Depok).Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden di bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau. Selain kuesioner, peneliti akan melakukan metode wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan data yang menunjang penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

6. Karmila,AmriesRusli Tanjung, dan Edfan Darlis (2013)

Penelitian yang dilakukan Karmila,dkk (2013) dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden di bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau. Selain kuesioner, peneliti akan melakukan metode wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan data yang menunjang penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kopetensi Sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

7. Wiwik Andriani (2010)

Penelitian yang dilakukan Andriani (2010) Dengan Judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner terhadap bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi dinas, badan, kantor dan bagian. Peneliti juga melakukan tanya jawab (wawancara) kepada responden mengenai kondisi sumber daya manusia, teknologi informasi yang ada di satuan kerja responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

8. Yosefrinaldi (2013)

Penelitian yang dilakukan Yosefrinaldi (2013) Dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel *Intervending* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian dilakukan dengan cara *survey* lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data untuk penelitian ini dikumpulkan

dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup. Kuesioner di sebar secara langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Dan hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

9. Winda Indriani (2016)

Penelitian yang dilakukan Winda Indriani (2016) dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yang menggunakan kuesioner agar diperoleh data yang relevan, dapat di percaya, objektif dan dapat di jadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan data melalui metode kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga, dapat diketahui kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi juga berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

10. Nilam Sari (2016)

Penelitian yang dilakukan Sari (2016) Dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Penerapan SAP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Juga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian terdahulu | Variabel | Hasil penelitian |
|----|--------------------------|--|--|
| 1 | Rizal Pramudiarta (2015) | Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. | <ul style="list-style-type: none"> -kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. -Sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. -pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. |
| 2 | Winda Indriani (2016) | Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. | <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. -Pemanfaatan Teknologi Informasi juga berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 3 | As Syifa Nurillah (2014) | Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD), pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah | <ul style="list-style-type: none"> -Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan . -Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. -Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan -Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD), pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah |
| 4 | Nilam Sari (2016) | Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. | <ul style="list-style-type: none"> -Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, -Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, -Penerapan SAP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, -Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Juga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. |

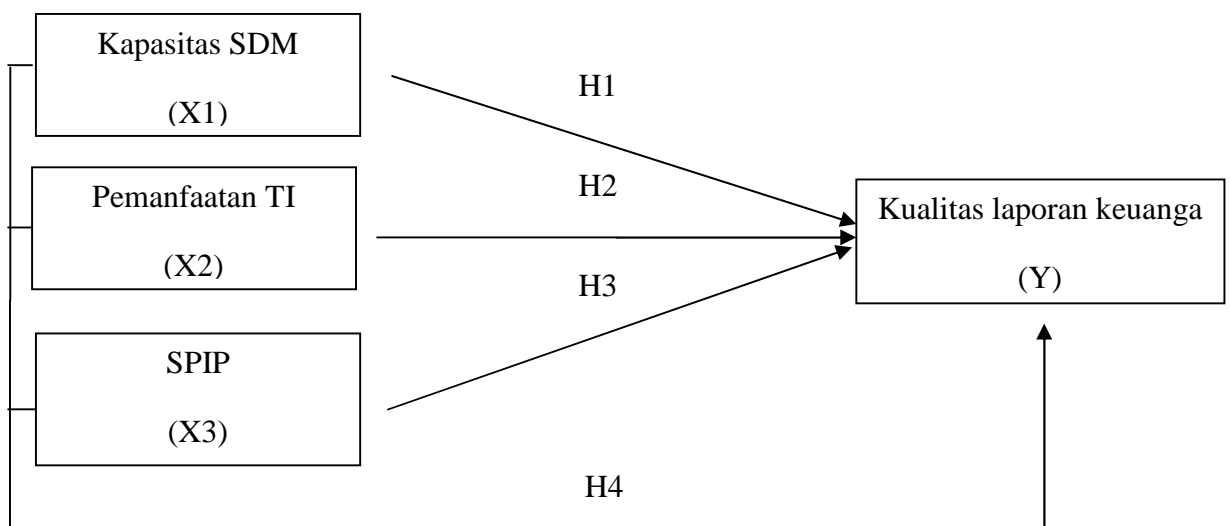
| | | | |
|----|--|---|--|
| 5 | Evin Andrianto (2017) | Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (studi empiris pada SKPD di kabupaten sleman) | -Kompeensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas lapora keuangan -Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan -Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah . |
| 6 | Dhedy Triwardana (2017) | Penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan | -penerapa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah -Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah -penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah |
| 7 | Wiwik andriani(2010) | Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. | -Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan daerah. -Pemanfatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 8 | Yosefrinaldi (2013) | Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Barat | -Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. -Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. -Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 9 | Karmila, Amries Rusli Tanjung, dan Edfan Darlis (2013) | Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. | -Kopetensi Sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. -pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. -Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. |
| 10 | Emilda Ihsanti (2014) | Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Aakuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah | -Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. -Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keua- ngan laporan keuangan pemerintah daerah. |

Sumber : kumpulan jurnal tahun 2016-2019 (<https://scholar.google.co.id/>)

Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kerangka penelitian digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 1: Kerangka Berfikir

Sumber : Skripsi Evin Andrianto Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta (2017)

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki keahlian dibidangnya, maka akan menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan fungsi akuntansi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia yang tinggi, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan, sehingga semakin tinggi Kapasitas Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Emilda Ihsanti (2014) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang menyimpulkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan hipotesis.

H_1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

Pemanfaatan teknologi adalah perbuatan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi baik pada internal maupun eksternal satu organisasi/instansi. Teknologi berfungsi untuk menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, atau transmisi. Teknologi mengkompilasikan catatan rinci aktivitas input dan dikelola menjadi output.

Dengan dimanfaatkannya teknologi, maka pekerjaan akan lebih cepat, tepat, dan andal. Komputer akan mengerjakan perhitungan yang kompleks dengan lebih cepat, komputer juga dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia sehingga hasilnya akan lebih dipercaya dibanding dengan jika dilakukan secara manual. Dalam penginputan data keuangan, aplikasi akuntansi akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi

kedalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi.

Dengan diterapkannya teknologi yang terkomputerisasi sebagai sarana penunjang dalam sebuah organisasi/instansi, maka seharusnya akan mampu mempengaruhi penyusunan laporan keuangan yang akan bermuara pada baik/buruknya laporan keuangan yang disusun oleh penyusun laporan keuangan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ayang Darmawan dan Darwanis (2018) tentang pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPA provinsi aceh menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara pemanfatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan hipotesis.

H_2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

Hubungan antara pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah sangat berkaitan. Dengan adanya pengendalian intern yang dipercaya dapat bermanfaat dalam mencegah terjadinya penyelewengan maupun kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemimpin/atasan dapat memberikan arahan terhadap bawahannya serta mengawasi sumber daya organisasi dari tindakan penggelapan atau fraud. Apabila sistem pengendalian intern suatu organisasi rendah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam penyajian laporan keuangan organisasi sangat besar. Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tinggi dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan atau fraud dalam penyajian laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Purwitasari yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dimana dengan menerapkan lingkungan pengendalian yang baik dan mengikuti aturan yang dibuat oleh pimpinan maka hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kesalahan pelaporan keuangan. Penelitian Wahyuni juga menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan kualitas Laporan Keuangan, Dengan hipotesis.

H_3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

4. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

Dengan dilakukannya penilaian atas kapasitas sumber daya manusia sebagai satu cara yang mampu meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun keahlian guna menunjang kinerja pegawai yang tentunya akan bermuara pada hasil kerja yang berkualitas seperti penyusunan laporan keuangan akan semakin baik bila di topang dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk mempercepat pekerjaan karena komputer akan mengerjakan perhitungan yang kompleks dengan lebih cepat, komputer juga dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia sehingga hasilnya akan lebih dipercaya dibanding dengan jika dilakukan secara manual dan akan semakin baik bila kapasitas sumber daya manusia yang mengolahnya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya.

Ketiga hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan bila benar benar diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diberikan hipotesis yaitu:

H_4 : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif memakai pendekatan kausal. Menurut Husein Umar dalam Oloheta Waruwu **“menyebutkan penelitian kausal berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya”**.³¹

Penelitian *causal comparative* berguna untuk menyelidiki kemungkinan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya, yaitu kapasitas sumber daya manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) sebagai variabel independen, kualitas laporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menyebarkan kuesioner pemerintahan Kota Medan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi secara etimologi dapat diartikan sebagai penduduk atau orang banyak yang memiliki sifat universal. Menurut Mardalis. **“populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang terkait**

³¹Oloheta Waruwu, **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Peran audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Nias Barat**, Skripsi Akuntansi UHN 2019, Hal 49

dengan masalah penelitian”.³²Populasi juga sering di artikan sebagai keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala gejala, benda benda, pola sikap, tingkah laku dan lain sebagainya yang menjadi objek peelitian. Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni, populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan. Jumlah OPD di Pemerintah Kota Medan sebanyak 70 OPD.

Tabel 3.1

Tabel Populasi Penelitian

| No. | OPD | Jumlah |
|--------------------|--|--------|
| SEKRETARIAT | | |
| 1 | Sekretariat Daerah | 2 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 2 |
| 3 | Inspektorat | 2 |
| BADAN | | |
| 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Paerah | 2 |
| 2 | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM | 2 |
| 3 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 2 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2 |
| 5 | Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 2 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Masyarakat | 2 |
| DINAS | | |
| 1 | Dinas Pendidikan | 2 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 2 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 2 |

³²Mardalis, **Metode Penelitian** ,Edisi Pertama, Cetakan Keduabelas : PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal.

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| 4 | Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang | 2 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2 |
| 6 | Dinas Sosial | 2 |
| 7 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | 2 |
| 8 | Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran | 2 |
| 9 | Dinas Ketenagakerjaan | 2 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 2 |
| 12 | Dinas Lingkungan hidup | 2 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan catatan Sipil | 2 |
| 14 | Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 2 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informasi | 2 |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2 |
| 18 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah | 2 |
| 19 | Dinas Pertanian dan Perikanan | 2 |
| 10 | Dinas perindustrian | 2 |
| 21 | Dinas Perdagangan | 2 |
| 22 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2 |
| 23 | Dinas Pariwisata | 2 |
| 24 | Dinas Kebudayaan | 2 |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 |
| Jumlah OPD Kota Medan | | 70 |

Sumber : <http://Pemko Medan.go.id>.

3.2.2 Sampel

Menurut Mardalis. Sampel merupakan **“sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian”**.³³ atau dengan kata lain sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi keseluruhan. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah karyawan atau pegawai dan para staf yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada OPD Pemerintah Kota Medan.

³³Ibid. hal. 55

Penyampelan atas responden dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan criteria yang telah ditetapkan. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Pegawai yang berlatar belakang akuntansi/keuangan pada setiap OPD Pemerintah Kota Medan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi bagian keuangan, bendahara dan *staff*
2. Pejabat yang menyusun laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka sampel yang diambil untuk menjadi audiens dalam penelitian ini sebanyak 70 orang yang tersebar di seluruh OPD Kota Medan (35 OPD). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan dana.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer. Dimana data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara langsung kantor pemerintahan Kota Medan dan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden, dimana kuesioner pada variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal.

Menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi:

“Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden”.³⁴

Dalam pengumpulan data, peneliti menunggu responden menjawab semua kuesioner yang telah disediakan sebelumnya. Untuk dapat menyelesaikan penyebaran kuesioner tersebut, peneliti memperkirakan waktu selama 1 bulan.

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan. Pengumpulan dan pengolahan data penelitian dilaksanakan pada September-november 2019. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuesioner pada pengelola keuangan di masing-masing SKPD di pemerintah Kota Medan yang memiliki tanggungjawab dan tugas pokok fungsi dalam penyusunan Laporan Keuangan.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono. **“variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.**³⁵ Dalam penelitian ini terdapat variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*), Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

³⁴ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian, Bumi Aksara**, Jakarta 2009, Hal 76

³⁵ Sugiyono **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D**, Alfabeta, Bandung, 2013 Hal 60-64.

Kota Medan Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, dan satu variabel dependen. Operasional untuk pengujian hipotesis yang dilakukan adalah.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Poin penilaian dalam kuisioner untuk setiap pernyataan yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju), N (Netral).

2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi keberadaan variabel ini akan mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3). Definisi operasional dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam organisasi dengan bekal pendidikan, pelatihan

dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Indikator variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman dan tanggungjawab. Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 4 Poin penilaian dalam kuisioner untuk setiap pernyataan yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju), N (Netral).

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Teknologi informasi meliputi komputer dan jaringan. Komputer terdiri atas dua bagian besar yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Jaringan merupakan suatu sistem yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya sehingga dapat berinteraksi atau saling bertukar data, Indikator variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dilihat dari penggunaan komputer dan jaringan. Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Poin penilaian dalam kuisioner untuk setiap pernyataan yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju), N (Netral).

c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Indikator variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) dilihat dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008. Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1

sampai 5.Poin penilaian dalam kuisisioner untuk setiap pernyataan yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju), N (Netral).

Tabel 3.1
Operasional variabel

| Variabel | Defenisi | Indikator | Skala | Butir |
|--|--|--|-------------------------|--------------|
| Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) | KapasitasSumberDaya Manusiaadalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam organisasi dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yangmemadai untukmencapaitujuan organisasisecaraefektif dan efisien. | -Latar belakang pendidikan. -Pelatihan. -Pengalaman. -Tanggung jawab | Skala <i>likert</i> 1-5 | 7 butir |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) | Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. | -Pengunaan perangkat keras -Pengunaan perangkat lunak -Pengunaan jaringan. | Skala <i>likert</i> 1-5 | 8 butir |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap | -Lingkungan pengendalian -Penilaian resiko -Kegiatan pengendalian -Informasi dan Komunikasi -Pemantauan. | Skala <i>likert</i> 1-5 | 7 butir |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------|
| | peraturan perundang undangan. | | | |
| Kualitas Laporan Keuangan (Y) | Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. | -Relevan -Andal -Dapat dibandingkan -dapat dipahami. | Skala <i>likert</i> 1-5 | 8butir |

Sumber : Skripsi Evin Andrianto Skripsi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta (2017)

3.6 Teknik Analisis Data

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu untuk menganalisis data penelitian tersebut akan menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Beberapa teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Analisis deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variable penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Statistik deskriptif dalam penelitian ini

disajikan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar *deviasi*.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali:

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, Suatu kuesioner “dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.”³⁶

Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson *correlation*. Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 atau 0,01 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. Korelasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Product Moment Pearson*, sebagai berikut:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}$$

Keterangan :

³⁶Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19**, Edisi Kelima, Semarang, 2011, Hal, 68

- r = koefisien korelasi *produst moment*
- N = jumlah responden
- X = skor untuk masing masing item pernyataan
- Y = jumlah skor keseluruhan dari seluruh item pernyataan untuk masing masing responden.

2. Uji Reliabilitas

Imam Ghozali mengatakan:

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel,“Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.”³⁷.

Kuisisioner dapat dikatakan reliable jika jawaban atas pernyataan konsisten. Pengukuran reliable dapat dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* dandengan bantuan program IBM SPSS dimana rumus yang digunakan yaitu:

$$r = \frac{k}{k-1} \frac{s_x^2 - \sum_j^k s_j^2}{s_x^2}$$

Keterangan :

- r = koefisien reliabilitas
- k = banyaknya jumlah item
- s_j^2 = varian skor soal
- s_x^2 = varian skor total

Nilai konstanta *Cronbach Alpha* adalah 0,60 maka jika instrument tersebut nilainya >0,60 dinyatakan reliable.

³⁷Ibid, hal 72

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan yaitu kolmogorov-smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila $-kolmogorov-smirnov\ test > 0,05$. Dengan bantuan program IBM SPSS. Dasar pengambilan keputusan dapat dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai $Sig \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
2. Jika nilai $sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

Cara untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$, artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Model yang dipakai adalah model analisis regresi berganda yaitu untuk mengetahui sejauh mana kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Konsekuensi dari heteroskedastisitas yaitu, jika terdapat pola yang jelas dan titik titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan berdasarkan masukan variabel X terhadap variabel Y. Penelitian ini juga menggunakan *uji glejser* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Kriteria dari *uji glejser* adalah apabila nilai t statistik dari seluruh variabel masing masing memiliki nilai p *value* $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian variabel tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan dapat dikatakan bersifat homokedastisitas.

Menurut Imam Ghozali :

“Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas, Uji ini dilakukan dengan metode Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen”³⁸

dengan persamaan regresi :

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

4. Uji Hipotesis

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Software SPSS (*Statistical Package For Social Science*). Analisis regresi berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien korelasi

X1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X3 = Sistem Pengendalian Internal

X4 = Pengembangan Mutu Karyawan

e = Variabel lain yang mempengaruhi

5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

³⁸Ibid, Hal, 139

“Nilai R^2 adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas”³⁹.

Jika nilai R^2 mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan Adjusted- R^2 karena nilai Adjusted- R^2 dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Semakin tinggi nilai Adjusted- R^2 maka semakin tinggi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

6. Uji Simultan (Ftest)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila F hitung $>$ F tabel (α) 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila F hitung $<$ F tabel (α) 0,05 maka hipotesis ditolak. Uji F dapat dilihat pada *output ANOVA* dari hasil statistic linear berganda dengan kriteria pengujian.

7. Uji Statistik t (t-test)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi secara parsial (uji t). uji statistik t pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh satu variable independen secara individual dalam

³⁹Ibid, Hal,97

menerangkan variabel dependen secara signifikan. Jika probabilitas $\text{sig.} < 0,05$ maka variabel independen secara

Individual mempengaruhi variabel dependen. Uji t digunakan untuk membandingkan nilai tengah sampel dengan nilai tengah tertentu atau nilai tengah sampel lainnya.

Dalam ilmu statistika terdapat empat macam uji statistik t (t test), yaitu:

1. Uji hipotesis bahwa nilai tengah populasi sama dengan sebuah nilai tertentu
2. Uji hipotesis untuk perbedaan dua nilai tengah contoh acak dengan ragam sama (*t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances*)
3. Uji hipotesis untuk perbedaan dua nilai tengah contoh acak dengan ragam tidak sama (*t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances*)
4. Uji hipotesis untuk nilai tengah contoh pada pengamatan berpasangan (*t Test: Paired Two Sample For Means*)